

ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTAR WILAYAH DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI SULAWESI UTARA

Annisa Anjani Anwar¹, Ita Pingkan F. Rorong², Krest D. Tolosang³

^{1,2,3}Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia

Email: annisaanjaniawar@gmail.com

ABSTRAK

Pada pelaksanaan pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai dengan pemerataan hasil pembangunan menjadi sasaran utama, tetapi kemajuan ekonomi yang tinggi belum mengartikan masyarakat menikmati hasilnya yang berarti terjadi ketimpangan dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara pada Tahun 2012 – 2021. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara (BPS Sulut) maupun literatur – literatur lainnya sesuai penelitian ini. Alat analisis yang digunakan adalah Indeks Williamson. Berdasarkan hasil analisis ketimpangan pembangunan wilayah Provinsi Sulawesi Utara, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan yang terjadi di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2012 – 2021 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena pengelolaan sumber daya alam di daerah lain berbeda dengan daerah yang dekat dengan pusat perekonomian sehingga menyebabkan pendapatan perkapitanya dibawa rata-rata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Utara adalah rendah atau merata dengan rata – rata angka Indeks Williamson 0,49 (< 0,5).

Kata kunci: Pembangunan Ekonomi, Ketimpangan, Indeks Williamson, PDRB

ABSTRACT

In the implementation of development, high economic growth accompanied by equitable distribution of development outcomes is the main target, but high economic progress has not meant that people enjoy the results which means that there is inequality of society. This study aims to analyze the level of development inequality between districts/cities in North Sulawesi Province in 2012 – 2021. The data used in this research is secondary data. The data was obtained from the North Sulawesi Central Bureau of Statistics (BPS North Sulawesi) as well as other literature according to this study. The analysis tool used is the Williamson Index. Based on the results of the analysis of regional development inequality in North Sulawesi Province, it can be concluded that inequality that occurred in the Regencies/Cities of North Sulawesi Province in 2012 - 2021 has increased from year to year. This is because the management of natural resources in other areas is different from areas close to the center of the economy, causing their per capita income to be below average. The results of the study show that inequality that occurs in North Sulawesi Province is low or evenly distributed with an average Williamson Index score of 0.49 (<0.5).

Keywords: Economic Development, Inequality, Williamson Indeks, PDRB

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan Ekonomi adalah salah satu kunci keberhasilan pembangunan ekonomi. Dalam pelaksanaan pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang cepat dan pemerataan hasil pembangunan menjadi tujuan utama. Namun pada kenyataannya, pertumbuhan ekonomi yang pesat mengakibatkan ketimpangan pembangunan yang tidak merata antar daerah. Ketimpangan pembangunan sering kali menjadi permasalahan serius dan jika tidak dapat diatasi secara hati-hati akan menimbulkan krisis yang lebih kompleks seperti masalah kependudukan, ekonomi, sosial, politik, lingkungan dan juga dalam konteks makro dapat merugikan proses pembangunan yang ingin dicapai suatu wilayah.

Ketimpangan pembangunan antar wilayah menjadi sangat penting supaya tujuan dari pembangunan yakni peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi barang kebutuhan pokok, peningkatan standar hidup masyarakat dapat terwujud secara bersama-sama baik pada tingkat regional maupun nasional. Disparitas secara ekonomi diartikan sebagai adanya perbedaan yang mencolok antara golongan orang kaya

dan orang miskin dalam hal distribusi pendapatan, distribusi kesejahteraan, latar belakang pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat kepuasan dan kebahagiaan hidup (Adrei dan Craciun, 2014).

Setiap wilayah umumnya mempunyai masalah di dalam proses pembangunannya, masalah yang paling sering muncul di dalam wilayah tersebut yang paling besar adalah masalah ketimpangan pembangunan ekonomi. Ketimpangan pembangunan antar daerah dengan pusat dan antar daerah satu dengan daerah lain merupakan suatu hal yang wajar, karena adanya perbedaan dalam sumber daya dan awal pelaksanaan pembangunan antar daerah (Hartono, 2008).

Pembangunan diarahkan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah dan antargolongan pendapatan. Kesenjangan ekonomi yang terjadi di Sulawesi Utara berkategori sedang. Penyebab kesenjangan ekonomi dan sosial di Sulawesi Utara adalah masih terbatasnya jangkauan sarana dan prasarana bagi masyarakat. Kondisi di atas menghadapi Sulawesi Utara pada tantangan untuk meningkatkan, pemeratakan, dan memperluas jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial lainnya, serta jangkauan informasi sampai ke seluruh pelosok daerah.

Penyebab ketimpangan antar wilayah di Provinsi Sulawesi Utara diantaranya adalah perbedaan kandungan sumber daya alam, sumber daya manusia dalam hal ini tenaga kerja, investasi yang berbeda – beda antar wilayah, mobilitas barang dan jasa, alokasi dana bantuan pembangunan antar wilayah, dan konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah. Sedangkan pada umumnya pembangunan daerah akan difokuskan pada pembangunan ekonomi. Dalam rangka memajukan pembangunan ekonomi diperlukannya pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan diikuti dengan membaiknya taraf hidup sasaran yang dicapai pada umumnya adalah untuk mencapai tingkat pertumbuhan PDRB jauh lebih tinggi dibanding dengan laju pertumbuhan penduduk.

Tabel 1 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2012 – 2021 (Jutaan Rupiah)

Kabupaten/Kota	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota (Juta Rupiah)									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bolaang Mongondow	3473725.1	3705497.7	3911380.40	4141599.70	4413199.20	4707458.7	5060106.7	5459314.3	5512884	5726207
Minahasa	7794591	8277510	8806209.30	9349470.20	9915909.00	10517441	11159065	11805487	11685361	12148044
Kepulauan Sangihe	2048629.1	2163380.2	2281136.10	2419696.50	2566764.40	2706570.9	2855316	3010133.1	3024283	3204989
Kepulauan Talaud	1132902.9	1191788.3	1253542.60	1319041.50	1388746.40	1459636.2	1532887.5	1604808	1611742	1665598
Minahasa Selatan	4022084.8	4287793.6	4575077.70	4863501.10	5110814.50	5444337.3	5775770.1	6120452.8	6073028	6371366
Minahasa Utara	5909892.7	6318070.9	6791620.40	7269076.70	7781693.70	8288057.5	8819578.4	9379227.7	9295281	9793830
Bolaang Mongondow Utara	1090624.7	1168294.6	1247860.30	1320203.20	1401509.80	1489523.4	1581646.6	1679214	1691098	1749597
Kepulauan Sitaro	983814.4	1062667.4	1143055.20	1223203.00	1308886.00	1400432.4	1494625.2	1594048.3	1610524	1681881
Minahasa Tenggara	2375259.4	2527706	2693963.40	2863530.20	3044362.20	3238027.7	3432322.7	3637719.1	3614410	3769488
Bolaang Mongondow Selatan	851326.6	912717.5	980918.80	1039393.70	1103135.60	1171958.6	1248799.3	1328571.5	1336974	1386962
Bolaang Mongondow Timur	1257668.1	1341909.5	1435603.20	1528600.30	1613813.50	1706002.1	1792386.9	1878469.8	1881482	1938799
Kota Manado	16255155.8	17419698	18584851.80	19773191.60	21193827.10	22622640	24126539	25585615	24778176	26053895
Kota Bitung	7715400.1	8229152.2	8755304.70	9064842.40	9537544.90	10127353	10735834	11171831	11325096	11846006
Kota Tomohon	2060549.2	2186140.3	2322072.70	2462138.00	2565300.00	2792169.6	2963090.4	3163458.4	3150486	3211878
Kota Kotamobagu	1525280.2	1632889.1	1742349.00	1855963.50	1979106.10	2113409.3	2254152.5	2392383.4	2396955	2498053
Sulawesi Utara	58677587	62422499	66360757.00	70425330.20	74764660.50	79484025	84249720	89009265	88126374	91790927

Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara, Tahun 2023

Dapat dilihat pada setiap tahunnya Provinsi Sulawesi Utara memiliki tingkat PDRB yang terus meningkat. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel diatas yaitu pada tahun 2012 PDRB Provinsi Sulawesi Utara sebesar 58677586.7 dan selalu mengalami peningkatan hingga tahun 2021 yaitu sebesar 91790927. Dimana hal ini Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu Provinsi yang kaya akan potensi sumber daya yang dapat dikembangkan sesuai dengan kemampuan masyarakatnya, guna membantu meningkatkan pembangunan daerah. Namun, potensi sumber daya yang melimpah tidak selalu merata disetiap

Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara sehingga menyebabkan ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara.

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dipaparkan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Sulawesi Utara pada Tahun 2012 – 2021.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses multidimensional yang mencakup perubahan struktur, sikap hidup, kelembagaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang sering diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita. Jadi tujuan dari Pembangunan ekonomi selain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketidakmerataan distribusi pendapatan dan pemberantasan kemiskinan (Todaro, 1997).

Pembangunan ekonomi mencakup semua aspek perubahan dalam kegiatan ekonomi, maka sampai dimana taraf pembangunan ekonomi yang dicapai suatu Negara telah meningkat, tidak mudah diukur secara kuantitatif. Berbagai jenis data perlu disajikan untuk menunjukkan capaian pembangunan suatu Negara.

2.2 Ketimpangan Antar Wilayah

Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi geografi yang terdapat pada masing – masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda.

Tidaklah mengherankan bilamana pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah maju (*Development Region*) dan wilayah terbelakang (*Underdevelopment Region*). Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Karena itu, aspek ketimpangan pembangunan antar wilayah ini juga mempunyai implikasi pula terhadap formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Hipotesa Neo-Klasik pada permulaan proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu, bila proses pembangunan terus berlanjut, maka secara berangsur – angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan menurun (Sjafrizal, 2008).

2.3 Produk Domestik Regional Bruto

Menurut Prasetyo (2009), istilah pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) secara paling sederhana dapat diartikan sebagai pertambahan output atau pertambahan pendapatan nasional agregat dalam kurun waktu tertentu misalkan satu tahun. Perekonomian suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan jika jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari pada tahun sebelumnya.

Menurut Sukirno (2012) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang di produksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. "*Economic Development is Growth Plus Change*" yang berarti pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan - perubahan dalam struktur dan corak (Sukirno, 2000). Simon Kuznets dalam Sukirno mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai suatu peningkatan sebagai suatu negara untuk menyediakan barang - barang ekonomi bagi penduduknya, pertumbuhan kemampuan ini disebabkan oleh kemajuan teknologi, kelembagaan, serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkan (Sukirno, 2005).

2.4 Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan unsur penting dalam kegiatan ekonomi serta usaha membangun suatu perekonomian karena penduduk menyediakan tenaga kerja, tenaga ahli, pimpinan perusahaan tenaga kerja usahawan dalam menciptakan kegiatan ekonomi (Sukirno, 2005).

Menurut Latumaerissa (2015), masalah jumlah penduduk perlu diketahui dalam pembangunan ekonomi, karena hal ini berhubungan erat dengan penyediaan tenaga kerja. Pertambahan jumlah penduduk menjadikan kompetisi dalam memperoleh lapangan kerja menjadi lebih ketat. Penawaran tenaga kerja yang lebih besar dari permintaan akan tenaga kerja menjadikan pekerja kelas bawah mau dibayar dibawah standar.

2.5 Hubungan Antara PDRB Perkapita dan Ketimpangan Pembangunan Wilayah

Pertumbuhan ekonomi dapat ditunjukkan dengan kenaikan dari PDRB per kapita tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk (Arsyad, 1999). Menurut Todaro (2004), laju pertumbuhan yang tinggi tidak selalu memperburuk distribusi pendapatan. Di dalam bukunya Todaro mengemukakan karakter pertumbuhan ekonomi (*character of economic growth*) yaitu bagaimana cara mencapainya, siapa yang berperan serta, sektor - sektor mana saja yang mendapat prioritas, lembaga-lembaga apa yang menyusun dan yang mengatur, dan sebagainya.

Karakter pertumbuhan ekonomi ini yang menentukan apakah pertumbuhan ekonomi mempengaruhi perbaikan taraf kehidupan masyarakat miskin atau tidak. Oleh karena itu, tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak dengan sendirinya diikuti oleh pertumbuhan atau perbaikan distribusi keuntungan bagi segenap penduduk. Mengikuti Hipotesa Neo-Klasik variabel yang dapat digunakan sebagai variabel independen adalah pendapatan perkapita (PDRB perkapita) yang menunjukkan tingkat pembangunan suatu negara (Sjafrizal, 2008).

2.6 Hubungan Antara Jumlah Penduduk Dan Ketimpangan Pembangunan Wilayah

Menurut Sukirno (2007), perkembangan jumlah penduduk merupakan faktor yang mendorong dan menghambat dalam pembangunan. Dikatakan sebagai faktor pendorong karena adanya kemungkinan semakin banyak tenaga kerja yang dihasilkan, lalu dikatakan sebagai penghambat jika pembangunan memberikan penurunan dalam produktivitas serta terjadinya banyak orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan yang mengakibatkan tidak mampunya dalam memenuhi kebutuhan di dalam hidupnya. Masalah kependudukan mempengaruhi pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembangunan di Indonesia yaitu pola penyebaran penduduk dan mobilitas tenaga kerja yang kurang seimbang baik dilihat dari sisi antar pulau, antar daerah maupun antar daerah perdesaan dan perkotaan.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Fitriyah dan Prabowo (2021) yang menganalisis ketimpangan pendapatan dan pengembangan sektor unggulan wilayah kota di provinsi jawa timur tahun 2010-2019, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat ketimpangan antar kota di Provinsi Jawa Timur, mengidentifikasi sektor unggulan tiap kota, dan mengetahui apakah terdapat gejala *trickledown effect* pada tiap kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010-2019. Dikarenakan beberapa perkotaan yang seharusnya lebih maju jika dibandingkan dengan kabupaten, memiliki produk domestik bruto yang lebih rendah daripada kabupaten maka daerah antar kota Provinsi Jawa Timur menarik untuk diteliti lebih jauh. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif dengan pendekatan matematis dan menggunakan alat analisis gabungan yaitu Indeks Williamson, Tipologi Klassen, Location Quotient, dan Shift Share. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan pendapatan antar kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010-2019 dengan rata-rata nilai indeks williamson sebesar 0,8.

Penelitian yang dilakukan oleh Hamdika dan Osmet (2019) yang menganalisis sektor pertanian dan ketimpangan pendapatan antar wilayah di provinsi Sumatera Barat, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) menghitung perbedaan pendapatan daerah di provinsi Sumatera Barat dan tren 20 tahun antara 1995 hingga 2014; dan (2) menganalisis peran sektor pertanian dalam perbedaan pendapatan daerah di provinsi tersebut. Indeks Williamson digunakan untuk menghitung disparitas pendapatan daerah berdasarkan data Produk Domestik Bruto Regional (PDRB) tahunan 12 kabupaten dan 7 kota di provinsi Sumatera Barat. Untuk melihat peran sektor pertanian dalam memengaruhi kesenjangan pendapatan daerah, perbandingan dibuat antara nilai-nilai indeks Williamson yang dihitung dengan dan tanpa kontribusi sektor pertanian dalam RGDP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) disparitas pendapatan daerah di Sumatera Barat berfluktuasi antara 1995 dan 2014 tetapi trend keseluruhan cenderung menurun. Indeks Williamson tertinggi adalah pada tahun 2002 sebesar 0,98 sedangkan yang terendah terjadi pada 2014 sebesar 0,26, (2) Sektor pertanian memiliki peran yang cukup signifikan dalam mengurangi kesenjangan pendapatan daerah di Sumatera Barat.

Penelitian yang dilakukan oleh Gurusinga (2022) yang menganalisis ketimpangan pendapatan antar kabupaten di provinsi Sumatera utara, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besar kecilnya ketimpangan antar kabupaten dan untuk mengetahui pengaruh dari tingkat investasi dan penyerapan tenaga kerja terhadap ketimpangan pendapatan antar kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa time series yang diperoleh dari website Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara dan website *National Single Window for Investment* (NSWI). Data diolah menggunakan metode analisis Indeks Williamson dan Regresi Data Panel dengan bantuan program *Microsoft Excel* 2010 dan *Eviews* 9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan pada pemerintahan daerah antar kabupaten di Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2016-2020 termasuk dalam kriteria yang rendah karena berada pada interval 0 – 0.5 yaitu sebesar 0.1329. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingkat investasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar kabupaten di Provinsi Sumatera Utara.

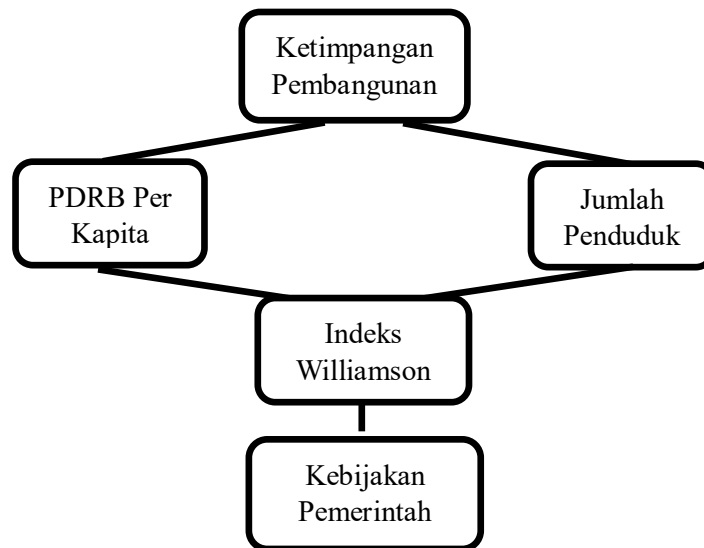
Penelitian yang dilakukan oleh Iqbal (2019) yang menganalisis ketimpangan pembangunan daerah antar provinsi di Indonesia 2013 – 2017, Dalam penelitian ini, penulis bertujuan mengetahui perkembangan ketimpangan antar wilayah di Indonesia dan menganalisis pengaruh variabel laju pertumbuhan ekonomi, penanaman modal dalam negeri, penanaman modal luar negeri, jumlah industri, dan kapasitas listrik yang didistribusikan terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan data kuantitatif, berupa data panel dan analisis spasial menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) proses pemetaan dilakukan menggunakan *software Quantum GIS (QGIS)* 3.8.2. Menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut, pertama bahwa dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 indeks Williamson untuk Indonesia mengalami trend peningkatan setiap tahunnya dengan perubahan status dari ketimpangan rendah menjadi tinggi antar daerahnya. Kedua, berdasarkan analisis kuantitatif didapatkan hasil bahwa variabel Industri, PMA PMDN memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan. Listrik berpengaruh negatif dan signifikan sedangkan Laju Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Noviar (2021) yang menganalisis ketimpangan dan klasifikasi pembangunan ekonomi kabupaten/kota di provinsi Banten tahun 2016 – 2020, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat ketimpangan pembangunan ekonomi dan menentukan klasifikasi wilayah kabupaten/kota di Banten periode tahun 2016-2020 menggunakan pendekatan Indeks Williamson dan Tipologi Klassen. Dari hasil penghitungan Indeks Williamson selama tahun 2016-2020, menunjukkan angka indeks yang selalu berada di atas angka 0,7 dan mendekati angka 1, kondisi ini menunjukkan bahwa

ketimpangan pembangunan ekonomi antarkabupaten/kota di Provinsi Banten tidak merata dan terjadi ketimpangan yang cukup tinggi antarkabupaten/kota. Perbedaan konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah menjadi salah satu penyebab tingginya ketimpangan pembangunan ekonomi daerah. Berdasarkan hasil penelitian menggunakan analisis Tipologi Klassen, disimpulkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota di Banten pada periode 2016-2020 termasuk klasifikasi daerah yang cepat berkembang, yaitu sebanyak lima kabupaten/kota.

2.8 Kerangka Konseptual

Gambar 1 Kerangka Berpikir Ilmiah



Sumber: Diolah oleh penulis

Bertambahnya jumlah penduduk yang semakin banyak dan dengan pertumbuhan yang tinggi dianggap hanya menambah masalah bagi pembangunan. Pembangunan ekonomi merupakan pembangunan yang sangat erat hubungannya dengan masalah kemiskinan. Jumlah penduduk memiliki hubungan yang positif terhadap jumlah penduduk miskin karena tingginya laju pertumbuhan penduduk menyebabkan jumlah penduduk meningkat dengan cepat sehingga mengakibatkan terjadinya kenaikan pada jumlah penduduk miskin. Salah satu indikator kesejahteraan suatu negara yang selalu menjadi perhatian adalah pendapatan perkapita. Hal yang harus diperhatikan adalah jika terdapat kesenjangan yang semakin melebar saat terjadi peningkatan pendapatan, baik kesenjangan antar wilayah, antar sektor ekonomi maupun kesenjangan pendapatan antar individu.

3. METODE PENELITIAN

Data Dan Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita atas dasar harga konstan dan data jumlah penduduk per Kabupaten/Kota tahun 2012 – 2021.

Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Utara. Data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara.

Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data ini merupakan prosedur yang sistematis dan standar guna memperoleh data kuantitatif, disamping metode - metode pengumpulan data memiliki fungsi teknis guna memungkinkan para peneliti melakukan pengumpulan data sedemikian rupa sehingga angka - angka dapat diberikan pada obyek yang diteliti.

Data yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini sepenuhnya diperoleh melalui studi pustaka sebagai metode pengumpulan datanya, sehingga tidak diperlukan teknik sampling serta questioner. Periode data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2012 - 2021. Sebagai pendukung, digunakan buku referensi, jurnal, serta browsing website internet yang terkait dengan masalah yang diteliti.

Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel

PDRB Per Kapita

Merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun tertentu sebagai tahun dasar dan sampai saat ini masih menggunakan tahun dasar 2010. Dalam penelitian ini digunakan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita tiap Kabupaten/Kota dan PDRB Per Kapita Provinsi Sulawesi Utara dengan tahun dasar 2010 yang dinyatakan dalam rupiah, untuk melihat pertumbuhan ekonomi dari tahun 2012 – 2021.

Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk merupakan faktor pendukung dan sekaligus sebagai faktor penghambat di dalam pembangunan. Dikatakan sebagai faktor pendukung karena jumlah penduduk yang besar menyediakan sumber tenaga yang besar pula untuk melaksanakan pembangunan. Faktor penghambat apabila jumlah penduduk yang besar hanya akan menambah beban pemerintah. Dalam penelitian ini digunakan data jumlah penduduk tiap Kabupaten/Kota dan jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2012 – 2021 dalam jiwa.

Metode Analisis

Indeks Williamson yang diperkenalkan oleh Williamson, yang merupakan metode untuk mengukur ketidakmerataan regional. Metode ini diperoleh dari perhitungan perkapita dan jumlah penduduk disuatu negara. Secara sistematis perhitungan Indeks Williamson sebagai berikut:

$$IW = \frac{\sqrt{\sum (y_i - \bar{y})^2 \left(\frac{f_i}{n}\right)}}{\bar{y}}$$

Dimana:

- IW = Indeks Williamson
- Yi = PDRB per kapita (dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota)
- Y = PDRB per kapita (Provinsi Sulawesi Utara)
- fi = Jumlah Penduduk (dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota)
- n = Jumlah Penduduk (Provinsi Sulawesi Utara)

Indeks ketimpangan Williamson yang diperoleh terletak antara 0 (nol) sampai 1 (satu). Jika ketimpangan Williamson mendekati 0 maka ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Sulawesi Utara adalah rendah atau pertumbuhan ekonomi antara daerah merata. Jika ketimpangan Williamson mendekati 1 maka ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Sulawesi Utara adalah tinggi atau pertumbuhan ekonomi antara daerah tidak merata.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Kependudukan

BPS Provinsi Sulawesi Utara mencatat penduduk Provinsi Sulawesi Utara pada Bulan September 2020 berjumlah sekitar 2,62 juta jiwa. Dengan luas daratan Provinsi Sulawesi Utara sebesar 13.892 km persegi, maka kepadatan penduduk Provinsi Sulawesi Utara sebesar 189 jiwa per km persegi. Selama 2010 - 2020, rata-rata laju pertumbuhan penduduk Provinsi Sulawesi Utara sebesar 1,40 persen.

Apabila dirinci menurut jenis kelamin, tercatat sejumlah 1,34 juta jiwa atau sekitar 51,18 persen merupakan penduduk laki-laki dan sejumlah 1,32 juta jiwa atau sekitar 48,82 persen merupakan penduduk perempuan. Sehingga besaran Sex Ratio Provinsi Sulawesi Utara adalah 105, yang artinya terdapat 105 orang penduduk laki-laki untuk 100 orang penduduk perempuan.

Ditinjau dari sisi kelompok umur, komposisi penduduk menurut kelompok umur di Provinsi Sulawesi Utara hasil Sensus Penduduk 2020 menunjukkan bahwa 72,28 persen penduduk merupakan kelompok usia produktif (15-64 tahun). Sedangkan sisanya sebesar 27,72 persen penduduk merupakan kelompok usia non produktif (0-14 tahun dan 64 tahun ke atas).

Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk di Provinsi Sulawesi Utara menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 2

Tabel 2 Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara (Jiwa)

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota (Jiwa)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Bolaang Mongondow Selatan	59294	60220	61177	62222	63207	64171	65127	66071	69791	70529
2	Kepulauan Sitaro	64721	65129	65284	65582	65827	65976	66225	66403	71817	72135
3	Bolaang Mongondow Timur	65922	66790	67824	68692	69716	70610	71477	72408	88241	89981
4	Bolaang Mongondow Utara	73120	74237	75290	76331	77383	78437	79366	80313	83112	83743
5	Kepulauan Talaud	85879	86926	87922	88803	89836	90678	91599	92475	94521	94983
6	Kota Tomohon	95388	96973	98686	100373	101981	103711	105306	106917	100587	100853
7	Minahasa Tenggara	102394	103129	103818	104536	105163	105714	106303	106899	116323	117079
8	Kota Kotamobagu	112394	114779	117019	119427	121699	123872	126198	128387	123722	124473
9	Kepulauan Sangihe	127878	128423	129103	129584	130024	130493	130833	131163	139262	139684
10	Minahasa Utara	193124	194869	196419	198084	199498	200985	202317	203624	224993	226915
11	Kota Bitung	195291	198794	202204	205675	208995	212409	215711	219004	225134	227177
12	Minahasa Selatan	199875	201668	203317	204983	206603	208013	209501	210695	236463	238746
13	Bolaang Mongondow	221869	225768	229604	233189	236893	240505	244185	247811	248751	250478
14	Minahasa	318691	322282	325680	329003	332190	335321	338364	341176	347290	348673
15	Kota Manado	417640	420401	423257	425634	427906	430133	431880	433635	451916	453182
Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Utara		2333480	2360388	2386604	2412118	2436921	2461028	2484392	2506981	2621923	2638631

Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara, Tahun 2023

Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbanyak tahun 2012 yaitu Kota Manado dengan angka 417.640 jiwa dan yang sedikit yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan angka 59.294 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak tahun 2013 masih berada pada Kota Manado dengan angka 420.401 jiwa dan yang sedikit yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan angka 60.220 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak tahun 2014 yaitu Kota Manado dengan angka 423.257 jiwa dan yang sedikit yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan angka 61.177 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak tahun 2015 yaitu Kota Manado dengan angka 425.634 jiwa dan yang sedikit yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan angka 62.222 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak tahun 2016 juga tetap dipegang oleh Kota Manado dengan angka 427.906 jiwa dan yang sedikit yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan angka 63.207 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak tahun 2017 masih berada pada Kota Manado dengan angka 430.133 jiwa dan yang sedikit yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan angka 64.171 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak tahun 2018 yaitu Kota Manado dengan angka 431.880 jiwa dan yang sedikit yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan angka 65.127

jiwa. Jumlah penduduk terbanyak tahun 2019 yaitu Kota Manado dengan angka 433.635 jiwa dan yang sedikit yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan angka 66.071 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak tahun 2020 yaitu Kota Manado dengan angka 451.916 jiwa dan yang sedikit yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan angka 69.791 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak tahun 2021 juga tetap dipegang oleh Kota Manado dengan angka 453.182 jiwa dan yang sedikit yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan angka 70.529 jiwa.

PDRB Per Kapita

Hasil perhitungan PDRB perkapita menurut kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat dalam Tabel 3

Tabel 3 PDRB Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2012 – 2021 (Jutaan Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	PDRB Per Kapita ADHK Menurut Kabupaten/Kota (Rupiah)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kepulauan Talaud	13.19185	13.71038	14.25744	14.85357	15.45868	16.09692	16.73476	17.35397	17.05168	17.53575
2	Kota Kotamobagu	13.57083	14.22638	14.88945	15.54057	16.2623	17.06123	17.86203	18.63416	19.37372	20.06904
3	Bolaang Mongondow Selatan	14.35772	15.15638	16.03411	16.7046	17.45274	18.26306	19.17483	20.10824	19.15683	19.66513
4	Bolaang Mongondow Utara	14.91555	15.73736	16.57405	17.29577	18.11134	18.99006	19.92852	20.90837	20.34722	20.89246
5	Bolaang Mongondow	15.65665	16.41286	17.03533	17.7607	18.6295	19.57323	20.72243	22.03015	22.16226	22.86112
6	Kepulauan Sitaro	15.20085	16.31635	17.50896	18.6515	19.88373	21.22639	22.5689	24.00567	22.42539	23.31574
7	Kepulauan Sangihe	16.02018	16.84574	17.66912	18.6728	19.7407	20.74112	21.82413	22.94956	21.7165	22.94457
8	Bolaang Mongondow Timur	19.07812	20.09147	21.1666	22.25296	23.14839	24.16091	25.07641	25.94285	21.32208	21.54676
9	Minahasa Selatan	20.123	21.26165	22.50219	23.72636	24.73737	26.17306	27.56918	29.04888	25.68278	26.6868
10	Kota Tomohon	21.60177	22.5438	23.52991	24.52988	25.15469	26.9226	28.13791	29.58798	31.32101	31.84712
11	Minahasa Tenggara	23.19725	24.51014	25.9489	27.39277	28.94899	30.63007	32.28811	34.0295	31.07219	32.19611
12	Minahasa	24.45815	25.68406	27.03945	28.41758	29.85011	31.36529	32.97947	34.60234	33.64727	34.84079
13	Minahasa Utara	30.60154	32.42214	34.57721	36.69694	39.00637	41.23719	43.59287	46.0615	41.31365	43.16079
14	Kota Bitung	39.5072	41.39538	43.29936	44.07362	45.63528	47.67855	49.76953	51.012	50.3038	52.14439
15	Kota Manado	38.92145	41.43591	43.90914	46.45586	49.52917	52.59452	55.86399	59.00265	54.82916	57.49102
Total PDRB Perkapita Sulawesi Utara		320.402	337.75	355.941	373.025	391.549	412.714	434.093	455.278	431.726	447.198

Sumber: Data Diolah

Tabel 3 menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota dengan pendapatan perkapita tergolong sangat rendah secara berturut-turut yaitu Kepulauan Talaud, Kotamobagu, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow, Kepulauan Sitaro, dan Kepulauan Sangihe. Sementara kabupaten/kota dengan pendapatan perkapita tergolong sangat tinggi secara berturut-turut yaitu Kota Manado, Bitung, Minahasa Utara, Minahasa, Minahasa Tenggara, Kota Tomohon, Minahasa Selatan dan Bolaang Mongondow Timur.

Analisis Tingkat Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Provinsi Sulawesi Utara

Selama sepuluh tahun terakhir, ada kecenderungan tingkat ketimpangan antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara mengalami peningkatan tetapi tingkat peningkatan tidak terlalu besar. Ketimpangan antar daerah di Provinsi Sulawesi Utara dapat diukur dengan menggunakan Indeks Williamson. Analisis Indeks Williamson digunakan untuk mengukur seberapa besar ketimpangan pembangunan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara. Indeks ini memiliki arti jika nilai Indeks Williamson mendekati 0, artinya ketimpangan rendah atau lebih merata dan jika mendekati 1, ketimpangannya tinggi atau melebar. Selama tahun 2012 sampai 2021 perhitungan Indeks Williamson memperoleh hasil sebagai berikut:

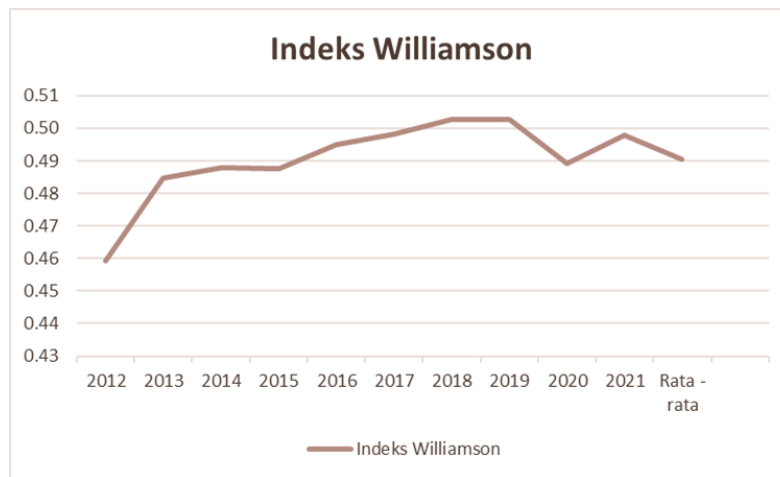
Tabel 4 Indeks Williamson Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2012 – 2021

Tahun	Indeks Williamson	Keterangan
2012	0.46	Disparitas Rendah
2013	0.48	Disparitas Rendah
2014	0.49	Disparitas Rendah
2015	0.49	Disparitas Rendah
2016	0.50	Disparitas Tinggi
2017	0.50	Disparitas Tinggi
2018	0.50	Disparitas Tinggi
2019	0.50	Disparitas Tinggi
2020	0.49	Disparitas Rendah
2021	0.50	Disparitas Tinggi
Rata - rata	0.49	Disparitas Rendah

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan hasil perhitungan angka Indeks Williamson, dapat dilihat pada tabel di atas bahwa ketimpangan yang terjadi antara Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara mengalami peningkatan yang cukup besar atau melebar itu terjadi pada tahun 2012 - 2021. Indeks Williamson yang paling tinggi terjadi pada tahun 2016 - 2019 yaitu sebesar 0,50 dan juga pada tahun 2021 sebesar 0,50. Indeks Williamson yang paling terendah pada tahun 2012 yaitu sebesar 0,46. Diketahui bahwa rata-rata ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara selama tahun 2012 – 2021 sebesar 0,49 dari pengamatan tersebut bisa diketahui bahwa nilai ketimpangan yang terjadi di Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara mengalami peningkatan hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan rendah atau lebih merata. Ukuran ketimpangan jika nilai Indeks Williamson mendekati 0 artinya di daerah tersebut ketimpangan rendah atau lebih merata dan apabila nilai Indeks Williamson mendekati 1 maka daerah tersebut terjadi ketimpangan yang sangat tinggi atau melebar.

Gambar 2 Indeks Williamson



Sumber: Data Diolah

Jika dilihat dari grafik di atas ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara semakin meningkat, kemungkinan hal tersebut terjadi karena setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga pembangunan tidak bisa diterima secara merata di setiap wilayah.

5. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis ketimpangan pembangunan antar wilayah provinsi Sulawesi Utara, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Utara periode 2012 – 2021 mengalami

peningkatan. Rata-rata angka Indeks Williamson di Provinsi Sulawesi Utara periode penelitian adalah sebesar 0,49. Hal tersebut terjadi karena setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga pembangunan tidak bisa diterima secara merata di setiap wilayah.

Adapun saran – saran yang dapat disampaikan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara sebaiknya melakukan pembangunan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya kerjasama yang baik antar sektor baik swasta maupun pemerintah, diharapkan menjadi sumber pertumbuhan bagi Provinsi Sulawesi Utara.
2. Perlu adanya tindakan dari pemerintah dengan mendistribusikan pendapatan ke masyarakat golongan menengah kebawah, dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan tingkat Pendidikan penduduk miskin. Jika lapangan pekerjaan yang tercipta lebih banyak untuk masyarakat golongan menengah atas yang memiliki Pendidikan tinggi, maka sangat sulit meningkatkan pendapatan masyarakat menengah bawah. Akhirnya, mereka tidak bisa keluar dari garis kemiskinan dan ketimpangan pun urung berkurang.
3. Diharapkan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mampu memperbaiki pelayanan dasar untuk mengurangi kesenjangan wilayah. Pemenuhan akses terhadap Pendidikan, Kesehatan, perumahan, air minum, dan sanitasi adalah layanan dasar yang sifatnya krusial bagi peningkatan kualitas kehidupan dan berpengaruh langsung pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. (1999). *Pengantar Pembangunan Ekonomi Daerah* (3rd ed.). Yogyakarta
- Badan Pusat Statistik. *Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara 2012 - 2021*.
- Badan Pusat Statistik. *PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2012 – 2021*.
- Ekwarso, H., Taryono, & Isyandi. (2016). Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Kecamatan Di Kota Dumai. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, VII(19), 1–16.
- Fitriyah, L., & Prabowo, P. S. (2021). Analisis Ketimpangan Pendapatan Dan Pengembangan Sektor Unggulan Wilayah Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2019. *INDEPENDENT : Journal Of Economics*, 1(2), 206–216. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/independent/article/view/40741>
- Hartono. (2008). *Teori Portofolio Dan Analisis Investasi* (8th ed.). Yogyakarta: BPFE
- Harvi Hamdika, Osmet, S. W. (2019). Agricultural Sector and Interruption of Inter-Regional Income in. *JOSETA: Journal of Socio Economic on Tropical Agriculture*, 1, 10–17.
- Iqbal, M. M. (2019). Analisis Ketimpangan Pembangunan Daerah Antar Provinsi Di Indonesia 2013-201. *Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, 1–23.
- Latumaerissa, J. (2015). *Perekonomian Indonesia dan Dinamika Ekonomi Global* (1st ed.). Bogor: Mitra Wacana Media. Mitra Wacana Media.
- Noviar, N. (2021). Analisis Ketimpangan Dan Klasifikasi Pembangunan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten Tahun 2016-2020. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 5(1), 24–33. <https://doi.org/10.37950/jkpd.v5i1.118>

Prasetyo, E. P. (2009). *Fundamental Makro Ekonomi*. Yogyakarta: PT. Beta Offset.

Raharja, M. C., & Lestari, U. (2022). Analisis Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah di Provinsi Jawa Tengah Sebelum Omnibus Law Cipta Kerja. *OECONOMICUS Journal of Economics*, 6(2), 86–101. <https://doi.org/10.15642/oje.2022.6.2.86-101>

Sirtama, B. W. (2021). Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pembuktian Hipotesis Kuznets). *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 5(4), 654–664. <https://doi.org/10.22219/jie.v5i04.17810>

Sjafrizal. (2008). *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi* (1st ed.). Jakarta: Baduouse Media.

Sukirno. (2000). *Makro Ekonomika Modern*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sukirno. (2005). *Mikro Ekonomi Teori Pengantar* (3rd ed.). Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sukirno. (2007). *Makro Ekonomi Modern Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Pustaka.

Sukirno. (2012). *Makroekonomi Teori Pengantar* (3rd ed.). Jakarta: Rajawali Pers.

Todaro, M. (2004). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (8th ed.). Jakarta: Erlangga.

Todaro, M. P. (1997). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (1st & 2nd ed.). Jakarta: Erlangga.